

Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Kalangan Masyarakat Indonesia

Irwan Polidu, Arif M. Ibrahim, Sri Wahyuni S. Moha
 Universitas Bina Taruna Gorontalo
irwanpolidusarjana@gmail.com, arifibrahim19@gmail.com,
sriwahyunismoha155@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia serta ingin mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam hal penerapan pendidikan demokrasi dikalangan masyarakat indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Pendidikan Demokratis Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik, Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Hambatan yang dilalui ialah Kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menghambat pengimplementasi demokrasi di negara berkembang, Tantangan lain dalam demokrasi di negara berkembang adalah ketergantungan pada sekelompok elit politik yang memonopoli kekuasaan dan membatasi partisipasi Rakyat dalam proses politik. Kurangnya akses ke informasi dan media yang bebas juga dapat mempengaruhi partisipasi rakyat dalam proses politik. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia Hal ini tentunya mesti diperhatikan oleh pemerintah, sebab untuk menciptakan masyarakat yang paham akan demokrasi perlunya pendidikan yang cukup baik dikalangan masyarakat desa serta masyarakat kota, berdasarkan hasil uraian diatas terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat itu dikarenakan sebahagian masyarakat kurang paham dan mampu apa itu demokrasi. Kata Kunci: **Pendidikan, Demokrasi, Masyarakat**

ABSTRACT

This research aims to find out the importance of democratic education among Indonesian society and wants to know what obstacles are faced in implementing democratic education among Indonesian society today. This research method is

normative legal research (normative law research) using normative case studies in the form of legal behavioral products, for example reviewing laws. The main point of study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. So normative legal research focuses on positive law inventory, legal principles and doctrine, legal discovery in cases in concreto, legal systematics, level of synchronization, legal comparison and legal history. The results of the research and discussion are Democratic Education. The term education according to the Big Indonesian Dictionary is the process of changing the attitudes and behavior of a person or group of people in an effort to mature humans through teaching and training efforts; processes, methods, educational actions, democratic education essentially guides students to become more mature in democracy by socializing democratic values, so that their behavior reflects democratic life. In democratic education, there are two things that must be emphasized, democracy as a concept and democracy as praxis. The obstacles faced are the lack of adequate infrastructure and human resources which also hinders the implementation of democracy in developing countries. Another challenge in democracy in developing countries is dependence on a group of political elites who monopolize power and limit people's participation in the political process. Lack of access to free information and media can also affect people's participation in the political process. The contribution drawn from this research is the importance of democratic education among Indonesian society. This must of course be taken into account by the government, because to create a society that understands democracy, adequate education is needed among rural and urban communities, based on the results of the description above, there is chaos in life. society is because some people do not understand and are capable of what democracy is.

Keywords: Education, Democracy, Society

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian *Economist Intelligence Unit* (EIU), kondisi demokrasi Indonesia masih berada di atas rata-rata global, meskipun relatif belum matang. Hal itu diungkapkan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto dalam konferensi pers Lemhannas "Menuju Kematangan Demokrasi Indonesia" di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023). Menurutny, demokrasi Indonesia dinilai baik dalam proses elektoral, tetapi cenderung lemah dalam aspek budaya politik. Andi mengatakan kondisi demokrasi nasional cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam sembilan tahun terakhir dan titik terbaik indeks demokrasi berada di 2015. Namun, perbandingan dengan Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan sifat anomali. "Idealnya, pembangunan demokrasi akan beriringan dengan perbaikan korupsi. Akan tetapi, di Indonesia, pergerakan kedua indeks tersebut sering kali bergerak tidak sinergis," jelasnya. Secara umum, skor Indeks Kebebasan Indonesia di atas rata-rata global dan dinilai unggul dalam pemenuhan hak politik masyarakat, tetapi aspek kebebasan sipil di Tanah air masih cukup tertinggal.

Beberapa isu yang menjadi catatan dalam penilaian Freedom House, antara lain penanganan tren kekerasan di Papua, kasus penuntutan hukum aktivis berbasis UU ITE, serta persekusi terhadap kelompok minoritas," tambahnya. Sementara itu,

tren kebebasan di tingkat global cenderung memburuk. Ditilik sejak tahun 2005, lebih banyak negara mengalami penurunan skor dibandingkan mengalami perbaikan kondisi kebebasan, Andi menjelaskan kondisi demokrasi di ASEAN yang masih belum sepenuhnya matang. Berdasarkan penilaian EIU tahun 2023, pelaksanaan demokrasi di negara-negara ASEAN berada di dua spektrum, yakni demokrasi terbatas atau otoriter, "Laju pembangunan demokrasi di ASEAN cukup variatif. Malaysia, Thailand, dan Indonesia mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar mengalami tren regresi atau turun," ujar Andi, Malaysia menempati urutan teratas dalam skor indeks demokrasi di ASEAN, diikuti Timor Leste di posisi kedua. Kemudian, Indonesia berada di urutan keempat di bawah Filipina dan Myanmar berada di urutan terakhir atau ke-10.¹

Berdasarkan pengamatan hasil demokrasi saat ini Indonesia mengalami banyak kemunduran, jika hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka dikalangan rakyat Indonesia akan terjadi perpecahan, olehnya wajib sesegera mungkin pemerintah Indonesia mengambil alih untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan demokrasi yang lebih baik lagi, "ungkap penulis"

Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (*flowed democracy*). "Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat," ujarnya, Pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Carol menjelaskan, di awal pandemi, respons pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respons yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik. Sayangnya, kata Carol, upaya pemerintah untuk menangani banyak hoaks ini ternyata ditangani secara represif menggunakan berbagai pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil. Lebih lanjut Carol mengatakan, pada 2021,²

Demokrasi pun hari ini sudah mulai tidak dipercaya dikangan masyarakat, itu disebabkan karena ketika para calon pemimpin berkampanye banyak menjanjikan sesuatu yang pada akhirnya tidak dipenuhi ketika rakyat memberikan mandat kepada mereka untuk memimpin suatu daerah dengan cara proses pemilihan umum, untuk memberantas pikiran ini dimasyarakat harus dilakukan metode-metode yang lebih membuat masyarakat percaya lagi akan pentingnya demokrasi dikalangan masyarakat, terserah pemerintah mau menggunakan metode yang seperti apa dikalangan masyarakat, baik melakukan pendekatan

¹ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/779265/kondisi-demokrasi-indonesia-di-atas-rata-rata-global>

² <https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/>

kebudayaan, agama, sosial dan lainnya. "ungkap penulis" Demokrasi secara konseptual diyakini sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik terbaik oleh sebagian besar masyarakat global, meskipun tersedia alternatif bentuk pemerintahan dan sistem politik lainnya seperti monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, hingga plutokrasi. Berbeda dengan model-model pemerintahan tersebut, demokrasi meletakkan rakyat sebagai elemen utama dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from people, by people, and for people*). Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi sebuah negara sebagai entitas politik dan sosial budaya berada di tangan rakyat (*people sovereignty*).

Problematisasi Demokrasi Reformasi politik 1998 telah menelurkan berbagai perubahan yang signifikan secara konstitusional dan regulatif demi perbaikan kualitas demokrasi. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah mandat secara konstitusional dan regulatif tersebut belum tentu bisa diimplementasikan secara paripurna. Dengan kata lain, resultansi implementasi perubahan-perubahan yang ditetapkan belum tentu ideal. Beragam permasalahan masih dimungkinkan terjadi sehingga memberikan distraksi atau hambatan terhadap tercapainya cita-cita ideal dari demokrasi itu sendiri, yakni rakyat Indonesia yang aman, adil, sejahtera kehidupannya. Permasalahan dan hambatan yang ada perlu dipetakan, terlebih lagi disikapi dengan cepat dan tepat sehingga tidak mengganggu konsolidasi demokrasi yang dilakukan, terlebih lagi apabila berpotensi mendorong Indonesia ke arah mobokrasi, yakni demokrasi yang kacau. Dalam tataran hasil, banyak kepala daerah produk Pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi. Merujuk pada catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Pilkada langsung digelar pada 2005, sedikitnya sudah 300 orang kepala daerah produk Pilkada langsung yang menjadi tersangka korupsi. 124 di antaranya ditangani oleh KPK. Hal ini menimbulkan kegundahan di banyak kalangan, apakah model pemilihan umum secara langsung ini tidak sesuai dengan kaidah demokrasi? apakah masalahnya ada pada konseptualnya atau kontekstualnya sehingga proses dan resultansinya kurang sesuai dengan cita-cita demokrasi? *Kedua*, partai politik adalah pilar utama demokrasi. Fungsi partai politik pascareformasi semakin vital tatkala sirkulasi elite dalam pemilihan umum "mewajibkan" para kandidat disokong oleh partai politik. Artinya, siapa pun yang hendak menjadi bupati, wali kota, anggota parlemen, hingga presiden, harus dicalonkan melalui partai politik.

Memang dalam skema Pilkada terdapat posibilitas pencalonan dari calon independen, tapi skalanya masih kecil dan belum dimandatkan secara konstitusional pada pemilihan presiden. Namun demikian, terdapat jurang yang lebar antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*). Masih banyak partai politik yang terjebak pada oligarki dan oportunistik politik, sehingga lebih mengutamakan kepentingan elite dan pertimbangan finansial dalam hajatan demokrasi seperti pemilihan umum. Partai politik masih mementingkan preferensi elite, serta pertimbangan akan elektabilitas dan kapasitas finansial calon dalam pemilihan umum, ketimbang aspek kompetensi, ideologi, visi-misi, dan integritas sang calon. *Ketiga*, kunci utama agar demokrasi tidak terjerumus ke arah mobokrasi adalah penguatan pada sistem hukum dan peradilan. Artinya, segala bentuk proses politik dan pemerintahan, termasuk sistem ekonomi yang dijalankan, harus patuh

pada kaidah hukum-hukum positif yang berlaku, utamanya UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Akan tetapi realitas yang terjadi masih jauh dari gambaran ideal. Masih banyak regulasi yang tumpang-tindih antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa aspirasi rakyat yang diserap mengalami sumbatan. Overlapping regulasi ini tak akan mungkin terjadi apabila perumusannya melibatkan suara dan kepentingan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah juga kerap tidak kompak dalam menyikapi permasalahan seperti yang tampak dalam penanganan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini. Yang paling fatal yang terjadi saat ini adalah aparat hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Kasus keterlibatan petinggi Polri dan Kejaksaan RI dalam kasus Djoko Tjandra merupakan “tamparan” keras terhadap demokrasi yang berjalan, *Keempat*, kehidupan yang berjalan lebih demokratis ternyata tak selalu berkorelasi lurus dengan kesejahteraan.

Muncul pertanyaan, apakah demokrasi mampu mewujudkan kesejahteraan? atau jangan-jangan ada model pemerintahan lainnya yang mampu mewujudkan harapan tersebut? Problematika ini dapat kita temui pada kehidupan sosial politik dan ekonomi di Papua. Meskipun sudah diberikan otonomi khusus, bahkan diberikan keleluasaan untuk membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), daerah Timur Indonesia ini masih terus bergolak. Sebagian tuntutan pemisahan yang disuarakan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kesejahteraan yang belum membaik. Sudah barang tentu realitas ini perlu dibedah dari perspektif demokrasi untuk mengurai benang kusut dan mencari solusi atas permasalahan yang ada, *Kelima*, eksistensi masyarakat sipil atau masyarakat madani yang mulai terdistraksi kepentingan elite dan politik.

Masyarakat madani merupakan kunci penting purifikasi demokrasi yang sedang berjalan. Keberadaan masyarakat madani yang fokus pada isu-isu reformasi seperti peradilan yang bersih, pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL, penghormatan terhadap HAM, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis menjadi kunci penting dalam arah gerak reformasi. Namun demikian, keberadaan masyarakat madani saat ini perlahan tapi pasti mulai kehilangan elan vitalnya. Makin banyak figur penting masyarakat madani yang masuk ke lingkaran kekuasaan sehingga berdampak pada pelemahan kelompok masyarakat madani tersebut. Yang tak kalah krusial adalah banyaknya kelompok masyarakat madani yang “gulung tikar” karena permasalahan pendanaan operasional. Fenomena ini penting dikaji dari kacamata demokrasi.

Ada banyak lagi kendala-kendala demokrasi lainnya yang belum tuntas hingga hari ini, seperti isu-isu pelanggaran HAM masa lampau yang belum selesai, kecenderungan penguatan TNI dalam kehidupan politik sehingga dianggap membahayakan demokrasi, *dual legitimacy* antara eksekutif dan legislatif sehingga menimbulkan inefektivitas dalam perumusan kebijakan, yang mana semua problematika tersebut bermuara pada belum berjalannya demokrasi yang sesuai dan mengadopsi nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi. Inilah yang menjadi tugas penting pemerintah dan masyarakat hari ini untuk membawa demokrasi, baik secara proses dan resultansi agar dapat memenuhi mandat reformasi dan konstitusi, yakni kehidupan

sosial politik yang bersih dan demokratis, serta rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis jurnal/artikel ini sebagai metode penelitian hukum.

Adapun pendekatan penelitian ini Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang Undangan (*statue approach*).⁵ Sebuah penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu analisa kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Kalangan Masyarakat Indonesia

Pendidikan Demokrasi di Sekolah Melalui Penguatan Literasi Kewargaan

Dewasa ini banyak tantangan yang dihadapi oleh negara serta masyarakat terkait perkembangan demokrasi di indonesia saat ini, sehinggannya proses untuk menuju kepada negara yang maju serta mampu bersaing di dunia internasional, indonesia cukup tertinggal, hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan kita banyak yang tidak diatur serta ditatakelola dengan baik, akibatnya semua aktifitas atau kegiatan masyarakat terganggu, seperti aktifitas perkembangan ekonomi, hukum, bisnis dan pemerintahan pun terganggu, dan hal ini sangat cukup untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam hal penanganannya “Ungkap Penulis”

Pendidikan Demokratis Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok

³ <https://kumparan.com/boy-anugerah/problematika-demokrasi-indonesia-1vB397csg1B/full>

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

⁶ Dr. Dwi leni nurmala journal dan artikel.pdf

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.⁷ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengartikan pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁹ Secara filosofis Muhammad Natsir menjelaskan bahwa yang dinamakan pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.¹⁰

Demokratis merupakan kata sifat dari demokrasi. Demokrasi menurut istilah merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warganegara.¹¹ Sedangkan menurut Wuri Soedjatmiko dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Tinggi dan Demokrasi” mengatakan bahwa demokrasi yang ideal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan keberbedaan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.¹² John Dewey yang dikutip oleh Alif Cahya Setiyadi menjelaskan bahwa pendidikan demokratis merupakan kebebasan dalam pendidikan karena individu lebih didominasi oleh hasrat alamiah. Hasrat yang tinggi ini mampu memunculkan rasa kasih sayang, keramahan, serta beberapa watak yang menonjol.¹³ Demokrasi sering diasumsikan dengan persoalan politik dan kekuasaan negara. Kenyataannya demokrasi tidak selalu berurusan dengan politik dan bukan semata-mata berkaitan dengan partai. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Winarno bahwa di era perkembangan baru menunjukkan

⁷ “Arti Kata Pendidikan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 20 Januari, 2021. <https://kbbi.web.id/pendidikan>

⁸ Undang-undang Republik Indonesia “20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.” (8 Juli 2003).

⁹ Nurkholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, Jurnal Kependidikan 1, nomor 1 (2013): 26, diakses pada 21 Januari, 2021, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/download/530/473>.

¹⁰ Nurkholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, 27.

¹¹ “Arti Kata Demokrasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 30 April, 2020. <https://kbbi.web.id/demokrasi>.

¹² Wuri Soedjatmiko, Pendidikan Tinggi dan Demokrasi dalam Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, ed. Sindhunata (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 49-50.

¹³ Alif Cahya Setiyadi, “Konsep Pendidikan Demokrasi Menurut John Dewey”, Jurnal At-Ta’dib 5, nomor 1 (2009): 87, diakses pada 02 Februari, 2021, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/585/521>.

bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dengan sistem politik saja, akan tetapi dapat dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup yang demokratis.¹⁴

Kemendikbudristek Dorong Pendidikan Demokrasi di Sekolah Melalui Penguatan Literasi Kewargaan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Anindito Aditomo mengatakan, pendidikan untuk mengenalkan, mempelajari, dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi adalah salah satu fungsi paling penting dan esensial dari cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang demokratis. Oleh sebab itu, pendidikan demokrasi didorong untuk dapat di implementasikan di sekolah, “Sila keempat Pancasila secara jelas mengekspresikan corak demokrasi di negara kita, demokrasi yang ingin diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selain memerlukan institusi dan prosedur-prosedur formal, keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada kapasitas kita sebagai warga negara untuk turut serta dalam proses negosiasi, berargumentasi, dan berdiskusi,” ungkapnya saat memberikan sambutan secara daring pada Rabu (30/6), Anindito melanjutkan, berargumen secara objektif itu bukan kemampuan yang natural, tetapi harus dilatih dan diasah secara sistematis. Kalau tidak diasah, menurutnya, kualitas penyampaian pendapat akan rendah dan ini tercermin dari diskusi tentang berbagai isu publik di kolom-kolom komentar, baik di media sosial, dan kanal lainnya, “Untuk itu, di mana lagi kalau bukan di sekolah kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi. Kita harus mengembangkan kemampuan yang diperlukan itu di ruang-ruang kelas melalui pembelajaran dalam interaksi antara guru dan murid ketika berdiskusi tentang materi pelajaran serta interaksi antar murid dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi,” ujar Anindito, Menurutnya, suasana yang demokratis di sekolah adalah suasana yang terbuka dan mendorong siswa untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri dan menyuarakannya. Hal ini idealnya terjadi di semua mata pelajaran, tetapi khususnya di mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang idealnya menjadi sumber utama pembelajaran demokrasi di sekolah.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Irsyad Zamjani mengatakan, kegiatan ini merupakan diskusi buku hasil penelitian Puslitjak tentang literasi kewargaan. Penelitian tersebut didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam payung Prioritas Riset Nasional (PRN) Demokrasi yang dikoordinasi oleh Pusat Penelitian Politik, LIPI. “Literasi kewargaan adalah salah satu tema yang penting dalam masyarakat kita saat ini dan itu sedang kita dorong juga secara serius melalui berbagai kebijakan pendidikan. Kita mempunyai Profil Pelajar Pancasila, di mana semua kebijakan dan hasil pembelajaran akan dimuarakan ke sana,” ujar Irsyad, Ia menambahkan, literasi kewargaan merupakan puncak literasi karena tidak sekadar mendorong keterampilan kognitif untuk menganalisis validitas atau kebenaran informasi, tetapi juga mendorong individu

¹⁴.Winarno, Pendidikan Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi (Jakarta: Bumi Angkasa, 2010), 97.

untuk memahami dan menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan warga dunia,

“Dengan literasi kewargaan, individu bukan hanya dituntut untuk menjadi cerdas, tetapi juga menjadi bermanfaat dan bertanggung jawab. Jadi, literasi ini juga sangat kental dengan penguatan karakter. Untuk itu, menanamkan literasi ini sejak dini sangat penting, khususnya melalui bangku sekolah. Buku yang ditulis teman-teman ini menganalisis bagaimana literasi kewargaan ini diajarkan di sekolah, khususnya melalui buku teks pelajaran PPKn,” tambahnya.

Memaknai Peran Pendidikan dalam Memerkuat Demokrasi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian Politik, LIPI, Firman Noor menyampaikan peran pendidikan sebagai instrumen untuk mengisi penguatan demokrasi dari dimensi substansi dan kultural. Menurutnya, tujuan pendidikan demokratik adalah (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi sehingga warga negara tercerahkan atas nilai-nilai demokrasi berikut hak dan kewajiban demokratiknya, (2) menguatkan kesadaran dan kepedulian atas apa yang harusnya menjadi perhatian dan bagaimana berkontribusi, dan (3) membuat masyarakat menjadi independen dan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dengan penguasa karena kecerdasan dan kemakmuran yang dimiliki, “Pendidikan terutama terkait politik, kewargaan, dan demokrasi yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah menghasilkan warga negara yang menyadari nilai-nilai demokrasi, seperti penghargaan kebebasan berpendapat, persamaan hak, keragaman, musyawarah, toleransi, dan penegakan hukum,” tutur Firman, Ia menambahkan, pendidikan yang baik dalam demokrasi itu melibatkan dan menghargai semua kalangan sehingga menghasilkan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, deliberatif, dan partisipatif. Ia menilai buku yang diluncurkan ini merupakan hasil kajian yang baik dan membanggakan, serta diharapkan dapat menghasilkan tunas-tunas bangsa yang demokratis demi penguatan demokrasi sebagai salah satu amanat bapak pendiri bangsa, konstitusi, dan reformasi “Temuan-temuan dalam buku ini sangat menarik karena didasarkan dengan berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) sehingga ke depan anggapan bahwa masyarakat kita tidak siap dalam berdemokrasi sudah tidak relevan karena memang sudah ada upaya yang serius untuk mendewasakan mereka (peserta didik) sejak dini dalam berdemokrasi melalui terbitnya buku ini,” tutur Firman.

Sementara itu, Peneliti Puslitjak Kemendikbudristek, Lukman Solihin menyampaikan hasil penelitiannya tentang konstruksi literasi kewargaan, khususnya di mata pelajaran PPKn jenjang SD, SMP, dan SMA, “Beberapa saran berdasarkan hasil kajian kami adalah (1) mengakomodasi materi masyarakat sipil secara lebih proporsional di jenjang SMP dan SMA, (2) menyajikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, dan (3) melengkapi materi dengan isu-isu kewarganegaraan,” ungkap Lukman, Ia menambahkan, salah satu pekerjaan rumah kita adalah tentang penumbuhan kesadaran politik kewargaan, yaitu bagaimana warga berdaya agar demokrasi Indonesia mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Artinya, warga yang setara, pendidikannya baik, dan cerdas membuat demokrasi kita menjadi lebih baik. “Partisipasi dan literasi berpengaruh besar terhadap demokrasi,” tuturnya, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI, Anggi Afriansyah, mengungkapkan, pendidikan memiliki

peran sentral dalam membantu terwujudnya demokrasi partisipatif sehingga mendorong warga untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada keadilan, “Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun iklim demokrasi di dunia pendidikan adalah (1) ruang kelas menjadi arena untuk membangun kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), (2) ruang kelas menjadi ruang pertemuan di antara berbagai kelompok (agama, etnis, kelas sosial), dan (3) ruang kelas sebagai arena dialog,” pungkas Anggi¹⁵

Hakikat Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi,¹⁶. Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan fraksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi diperlukan pendekar, pejuang demokrasi seperti Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Jr. yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustrasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan penjara menantinya. Dengan gagah berani meneriakkan sosialisasi pendidikan demokrasi untuk mewujudkan nilai egalitarian, nilai demokrasi harus dibawa seorang pakar yang meyakini kebenaran demokrasi sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap hati (*personal, individu*) agar suatu hari nanti kehidupan demokrasi dan perdamaian akan terwujud. Dengan adanya benih demokrasi yang sudah disemaikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat diharapkan setiap *personal* dapat mempraktikkan demokrasi dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal demokrasi yang sudah ada dalam *personal* merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan demokrasi dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to now, learning to live together*. Apalagi apabila guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan konsep “*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Ttut wuri handayani*”.¹⁷

Hambatan Penerapan Pendidikan Demokrasi di Indonesia

¹⁵.<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/kemendikbudristek-dorong-pendidikan-demokrasi-di-sekolah-melalui-penguatan-literasi-kewargaan>

¹⁶. (Sunarso, 2004: 3).

¹⁷.<https://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/PENTINGNYA++PENDIDIKAN++DEMOKRASI++14+Feb+2007.pdf>

Penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia mengalami hambatan disebabkan oleh: a. Tantangan paling utama dalam demokrasi di negara berkembang yaitu korupsi. Korupsi merusak menghambat sistem demokrasi dan membuat proses politik tidak adil. Korupsi juga memperburuk kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi; b. Hambatan dalam demokrasi dinegara berkembang adalah hak asasi manusia yang menjadi tantangan dalam negara yang berdemokrasi. Beberapa negara berkembang seringkali mengalami masalah dalam menjaga hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya Lembaga independent yang dapat memperjuangkan hak-hak tersebut. oleh karena itu diperlukan Lembaga yang kuat dan independen untuk memastikan hak-hak asasi manusia terlindungi; c. Negara berkembang dihadapkan pada masalah Pendidikan, tantangan ini yang dihadapi negara berkembang dalam mengimplementasikan demokrasi adalah kurangnya Pendidikan dan kesadaran politik dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat di negara berkembang tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang demokrasi dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat menghambat mereka dalam partisipasi proses politik, dan membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab; d. Kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menghambat pengimplementasi demokrasi di negara berkembang. Sudah menjadi hal yang lumrah infrastruktur negara berkembang baik itu di politik dan ekonomi sangat lemah yang menghambat proses demokratisasi. Selain itu kurang nya sumber daya manusia yang memadai dalam bidang politik dan pemerintahan juga dapat menghambat kemampuan negara berkembang untuk menjalankan demokrasi dengan efektif; e. Tantangan lain dalam demokrasi di negara berkembang adalah ketergantungan pada sekelompok elit politik yang memonopoli kekuasaan dan membatasi partisipasi Rakyat dalam proses politik. Kurangnya akses ke informasi dan media yang bebas juga dapat mempengaruhi partisipasi rakyat dalam proses politik.

Meskipun demokrasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan tetap penting untuk mempertahankan sistem ini sebagai alternatif terbaik untuk menjamin keadilan dan kemakmuran. Untuk memperkuat demokrasi di negara berkembang, dibutuhkan reformasi yang menyeluruh dan konsisten. Juga memperkuat Lembaga-lembaga independent dan peningkatan akses ke Pendidikan dan peluang kerja. Serta partisipasi Rakyat yang lebih luas dalam proses politik. Selain itu negara berkembang perlu mengambil Langkah-langkah dalam meningkatkan Pendidikan serta kesadaran politik. Memerangi korupsi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas politik, serta mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Selain itu negara berkembang juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam mengimplementasikan demokrasi.¹⁸

¹⁸

https://www.kompasiana.com/ridwanarizwibowo0127/649d834c08a8b50fc86db652/tantangan-dan-hambatan-dalam-implementasi-demokrasi-di-negara-berkembang#google_vignette

Menurut Lukman, dari kajian ini didapatkan temuan bahwa secara substansi, konten materi pendidikan kewarganegaraan pada mata pelajaran PPKn cenderung tidak berimbang. Ini terutama untuk aspek *civil society* yang lebih banyak di SD, tetapi minim di SMP dan SMA. Selain itu, pembahasan materi adakalanya tidak kontekstual, tidak berimbang, dan kurang eksploratif.

”Narasi tentang hak dan kewajiban, umumnya lebih dominan tentang kewajiban. Eksplorasi masih terbatas dan sepotong-sepotong. Beberapa isu penting seperti konflik belum muncul dibahas,” tutur Lukman.¹⁹

Berdasarkan hasil pengamatan diatas hal ini perlu adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat Indonesia khususnya di wilayah pedesaan terlebih dahulu, sehingga hal-hal penting terkait pemahaman terhadap pendidikan demokrasi bisa diterima dengan baik, hal ini perlu karena kita harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan pada tingkatan tertinggi dalam hal menghargai, baik budaya, ras, antar golongan dan antar kepercayaan/agama, (Humanisme) jika hal ini terlaksanakan dengan baik maka pendidikan demokrasi bisa terimplementasikan dengan baik dan bisa diserap secara merata”Ungkap Penulis”

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini tentunya mesti diperhatikan oleh pemerintah, sebab untuk menciptakan masyarakat yang paham akan demokrasi perlunya pendidikan yang cukup baik di kalangan masyarakat desa serta masyarakat kota, berdasarkan hasil uraian diatas terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat itu dikarenakan sebahagian masyarakat kurang paham dan mampu apa itu demokrasi. Hambatan penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia. Tentunya dalam penerapan Pendidikan Demokrasi Di Indonesia cukup mempunyai hambatan, tetapi sebuah negara yang memiliki kemauan untuk menjadi negara maju haruslah berusaha apapun tantangan dan hambatan haruslah dihadapi dan diselesaikan dengan berbagai macam terobosan serta ide-ide terbaik, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah solusi terbaik untuk merubah pikiran, budi pekerti serta mampu merubah sebuah bangsa

Untuk itu disarankan, perlu adanya regulasi baru pemerintah dalam hal pelaksanaan pendidikan demokrasi di era modern saat ini, khususnya di kalangan masyarakat sehingga pelaksanaannya efektif dan terarah sesuai harapan dan manfaatnya sebab jika hal ini tidak dilaksanakan maka kekacauan masyarakat dalam memahami demokrasi akan berakibat merusak bangsa dan negara. Dalam hal kehidupan bernegara, kekacauan adalah sebuah dinamika yang mesti ditangani dan diperbaiki dalam hal pengaturannya oleh pemerintah, sebuah negara maju berangkat dari kekuatan untuk merubah hal buruk menjadi baik, nah menciptakan regulasi baru adalah sebuah solusi untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

DAFTAR PUSTAKA

<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/779265/kondisi-demokrasi-indonesia-di-atas-rata-rata-global>

¹⁹ <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/06/30/bekal-pendidikan-demokrasi-di-sekolah-belum-optimal>

<https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/>

<https://kumparan.com/boy-anugerah/problematika-demokrasi-indonesia-1vB397csg1B/full>

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

Dr. Dwi leni nurmala journal dan artikel.pdf

Arti Kata Pendidikan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 20 Januari, 2021. <https://kbbi.web.id/pendidikan>

Undang-undang Republik Indonesia “20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.” (8 Juli 2003).

Nurkholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, Jurnal Kependidikan 1, nomor 1 (2013): 26, diakses pada 21 Januari, 2021, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/download/530/473>.

Nurkholis, “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi”, 27.

Arti Kata Demokrasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 30 April, 2020. <https://kbbi.web.id/demokrasi>.

Wuri Soedjatmiko, Pendidikan Tinggi dan Demokrasi dalam Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, ed. Sindhunata (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 49-50.

Alif Cahya Setiyadi, “Konsep Pendidikan Demokrasi Menurut John Dewey”, Jurnal At-Ta’dib 5, nomor 1 (2009):87, diakses pada 02 Februari, 2021, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/585/521>.

Winarno, Pendidikan Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi (Jakarta: Bumi Angkasa, 2010), 97.

[https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/kemendikbudristek-dorong – pendidikan – demokrasi – di – sekolah – melalui – penguatan-literasi-kewargaan](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/kemendikbudristek-dorong-pendidikan-demokrasi-di-sekolah-melalui-penguatan-literasi-kewargaan)

(Sunarso, 2004: 3).

<https://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/PENTINGNYA++PENDIDIKAN++DEMOKRASI++14+Feb+2007.pdf>

[https://www.kompasiana.com/ridwanarizwibowo0127/649d834c08a8b50fc86db652/tantangan -dan - hambatan - dalam – implementasi – demokrasi – di - negara berkembang #google_vignette](https://www.kompasiana.com/ridwanarizwibowo0127/649d834c08a8b50fc86db652/tantangan-dan-hambatan-dalam-implementasi-demokrasi-di-negara-berkembang#google_vignette)

[https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/06/30/bekal - pendidikan-demokrasi – di – sekolah – belum - optimal](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/06/30/bekal-pendidikan-demokrasi-di-sekolah-belum-optimal)